

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang dimana pertumbuhan ekonomi merupakan hal yang penting dan selalu diupayakan oleh berbagai sektor pelaku ekonomi dari skala makro hingga mikro. Salah satu sektor yang memberikan kontribusi cukup besar adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM dengan jumlahnya yang banyak dan tersebar di seluruh Indonesia dinilai mampu mengatasi berbagai permasalahan yang dialami sejak lama (Yandris et al., 2023). Munculnya pandemi COVID-19, UMKM menghadapi tantangan besar seperti penurunan pendapatan, kesulitan operasional, serta risiko kebangkrutan, namun dari banyaknya UMKM yang bangkrut ada beberapa pelaku UMKM yang tetap bertahan sampai sekarang karena memiliki strategi penjualan dan pemasaran yang baik seperti pemanfaatan internet (Assyfa, 2023).

UMKM memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama dalam menciptakan lapangan pekerjaan, pemerataan ekonomi, serta kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). UMKM menyerap banyak tenaga kerja, yang membantu untuk menurunkan tingkat pengangguran, khususnya di wilayah perdesaan. Selain itu, kontribusi UMKM dalam menjaga kestabilan ekonomi pada masa pandemi COVID-19, dimana UMKM ini lebih tangguh dalam menghadapi tantangan dibandingkan

perusahaan besar, sehingga UMKM dapat dianggap sebagai tulang punggung ekonomi nasional yang menjadi roda ekonomi dalam situasi sulit.

UMKM diklasifikasikan berdasarkan aset dan omset tahunan mereka. Pertama, usaha mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan usaha, dan memiliki hasil penjualan tahunan sampai paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Kedua, usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan usaha, dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Ketiga, usaha menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan usaha, dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), (Pemerintah Indonesia, PP Nomor 7, 2021).

Menurut Kadin (2023), peran UMKM sangat besar untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia, dengan jumlahnya mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha. Pada tahun 2023 pelaku usaha UMKM mencapai sekitar 66 juta. Kontribusi UMKM mencapai 61% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia, setara Rp 9.580 triliun. UMKM menyerap sekitar 117 juta pekerja

(97%) dari total tenaga kerja. Besarnya kontribusi UMKM dalam perekonomian menjadikan pencatatan dan pelaporan keuangan yang baik sebagai faktor penting dapat mengoptimalkan usaha mereka.

Menurut Kurniwati et al. (2012) dalam Syamsul (2022) pencatatan dan pelaporan keuangan yang baik merupakan salah satu faktor utama dalam menunjang keberhasilan UMKM. Pencatatan dan pelaporan keuangan sangat bermanfaat sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan suatu bisnis dalam rangka pengembangan dan kesuksesan UMKM. Selain itu, laporan keuangan juga membantu mengukur likuiditas untuk meminimalkan resiko yang mungkin terjadi (Luchindawati et al., 2021).

Laporan keuangan yang disusun sesuai standar, seperti SAK EMKM, UMKM dapat lebih mudah memperoleh pendanaan dan meningkatkan daya saing mereka di pasar. Adanya laporan keuangan yang disusun secara terstruktur juga penting untuk mendapatkan akses modal dari pihak eksternal, seperti bank dan lembaga keuangan lainnya. Bank memerlukan laporan keuangan yang akurat dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku untuk menilai kelayakan debitur. Laporan keuangan yang baik memainkan peran krusial dalam mendukung pertumbuhan bisnis serta mempermudah UMKM dalam mendapatkan akses modal.

Pertumbuhan usaha UMKM memerlukan tambahan modal. Agar mendapatkan tambahan modal tersebut, UMKM membutuhkan dukungan dari pihak eksternal, seperti bank atau lembaga keuangan lainnya. Pihak pemberi modal memerlukan laporan keuangan yang sesuai dengan standar sebagai alat

untuk menganalisis kinerja keuangan dan melihat posisi keuangan UMKM. Informasi ini digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan pendanaan, sehingga dapat meningkatkan kesempatan UMKM untuk bertumbuh secara berkelanjutan.

Salah satu tantangan utama atau penyakit yang dihadapi oleh UMKM mikro adalah tidak adanya pencatatan atau pembukuan keuangan yang sistematis. Akibatnya, pelaku usaha mengalami kesulitan dalam menilai kinerja keuangan usaha serta merancang strategi pengembangan bisnis secara efektif.

Banyak UMKM menghadapi kesulitan dalam hal pencatatan keuangan. Kendala utama pelaku UMKM yaitu kurangnya pengetahuan dan pemahaman terhadap akuntansi itu sendiri, yang menyebabkan kesulitan dalam mengelola keuangan. Selain itu, adanya keterbatasan sumber daya manusia, dimana pelaku UMKM sering kali berperan secara ganda dalam usahanya. Adanya anggapan bahwa pencatatan dan pembukuan keuangan tidak penting juga menjadi faktor penghambat. Kondisi ini diperburuk dengan minimnya akses pelatihan akuntansi yang memadai, sehingga banyak diantara mereka yang masih belum membuat laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi.

Untuk menyeragamkan penyusunan laporan keuangan serta mengatasi tantangan yang disebutkan sebelumnya, Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) telah menerbitkan SAK EMKM, yaitu Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah pada tanggal 24 Oktober 2016, yang berlaku

efektif mulai 1 Januari 2018. Diterbitkannya SAK EMKM bertujuan untuk memberikan panduan yang sederhana karena mengatur transaksi umum yang dilakukan oleh EMKM dan dasar pengukurannya murni menggunakan biaya historis, sehingga EMKM cukup mencatat aset dan liabilitasnya sebesar biaya perolehannya. Adanya SAK EMKM menjadi acuan bagi pelaku UMKM dalam melakukan proses penyusunan laporan keuangan yang dapat diterima secara umum.

Sebelumnya Standar Akuntansi Keuangan adalah SAK ETAP, Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk digunakan oleh Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP), yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal (Ikatan Akuntan Indonesia, 2019).

SAK EMKM disahkan pada tanggal 24 Oktober 2016, SAK EMKM merupakan standar akuntansi keuangan yang berdiri sendiri yang dapat digunakan oleh entitas yang memenuhi definisi entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan sebagaimana yang diatur dalam SAK ETAP dan karakteristik dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). SAK EMKM secara eksplisit mendeskripsikan konsep entitas bisnis sebagai salah satu asumsi dasarnya dan oleh karena itu untuk dapat menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM, entitas harus dapat memisahkan kekayaan pribadi pemilik dengan

kekayaan dan hasil usaha entitas tersebut, dan antara suatu usaha/entitas dengan usaha/entitas (Ikatan Akuntan Indonesia, 2022).

Penerapan SAK EMKM masih menghadapi banyak tantangan. Menurut Siregar (2021), hampir 80% pelaku usaha belum membuat laporan keuangan sesuai SAK EMKM, hanya sekitar 20% pelaku usaha yang sudah melakukan pembuatan laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM, hal tersebut kemungkinan berlaku bagi pelaku usaha UMKM yang memiliki latar belakang pendidikan dalam bidang akuntansi atau manajemen. Tantangan ini muncul karena banyak pelaku usaha yang masih kesulitan memahami pentingnya standar keuangan, selain itu kurangnya sosialisasi menjadi hambatan dalam penerapan SAK EMKM dikalangan UMKM.

Kesiapan dalam menerapkan SAK EMKM dapat diukur melalui beberapa aspek penting yang harus dipenuhi oleh UMKM. Pertama, yaitu pemahaman UMKM terhadap standar akuntansi keuangan, yang berperan penting dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku, UMKM dapat dikatakan siap menerapkan SAK EMKM dalam penyusunan laporan keuangannya adalah ketika UMKM dapat mengerti dan mengetahui tentang SAK EMKM (Kholifah & Firmansyah, 2021).

Kedua, persepsi UMKM terhadap laporan keuangan juga mempengaruhi standar yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, persepsi sangatlah berdampak besar bagi pemahaman UMKM terhadap SAK EMKM sehingga menyebabkan tidak atau diterapkannya SAK EMKM dalam pembukuan usahanya (Kholifah & Firmansyah, 2021).

Ketiga, sumber daya manusia (SDM) yang kompeten di bidang pembukuan menjadi kunci dalam penerapan SAK EMKM dalam penyusunan laporan keuangan, jika UMKM telah memiliki sumber daya yang mampu membuat laporan keuangan berdasarkan standar, maka UMKM tersebut dikatakan siap menerima SAK EMKM. Sebaliknya, jika UMKM tidak memiliki sumber daya yang kompeten dalam bidang keuangan maka, UMKM tersebut belum siap menerapkan (Kholifah & Firmansyah, 2021).

UD – DANI MUSAFa, yang berlokasi di Desa Sidomulyo, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, adalah usaha manufaktur yang memproduksi dan menjual tudung atau caping. Selain itu, UD – DANI MUSAFa juga menyediakan produk lain seperti tas, tampah, cobek, kipas, lumpang, kopyah, dan keset. Namun, UD – DANI MUSAFa belum melaksanakan pencatatan dan penerapan SAK EMKM, karena menghadapi beberapa tantangan, seperti kurangnya pengetahuan dan pemahaman terhadap akuntansi, keterbatasan sumber daya manusia, serta anggapan bahwa pencatatan dan pembukuan keuangan tidak penting serta rumit menjadi beberapa faktor yang menghambat penerapan SAK EMKM. Pencatatan akuntansi pada UD – DANI MUSAFa masih dilakukan secara sederhana dan manual yaitu hanya dilakukan dengan menempel nota kedalam satu arsip buku dan penyusunan laporan keuangan belum sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. UD – DANI MUSAFa hanya mencatat pemasukan dan pengeluaran, sehingga tidak dapat mengetahui laba atau profit dari usahanya.

17 D E 67
Tuan Toko 25.10.2024

NOTA No.

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
80	cebek 20	15000	1.200
180	22	17000	3.060
80	24	18000	1.440
100	18	12500	1.250
8	lumpang 16	44000	352
8	18	55000	440
8	20	60000	480
8	22	70000	560
400	xipas sate jumbo	4000	1.600
400	xipas sate besar	2900	1.160
15	zampah A 3	230	3.450
60	zampah A 2 12	195	11.700
			125.455
			130.207
			300
			140.927.000

Tanda Terima
Surin
Jumlah Rp
Normal Kain

Gambar I.1 Pencatatan Penjualan UD - DANI MUSAFA

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis “**KESIAPAN UMKM DALAM PENERAPAN SAK EMKM (STUDI PADA UD – DANI MUSAFA)**” berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kholifah & Firmansyah (2021).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kesiapan pelaku UD – DANI MUSAFA dalam menerapkan SAK EMKM dengan aspek pemahaman standar akuntansi keuangan?
2. Bagaimana kesiapan pelaku UD – DANI MUSAFA dalam menerapkan SAK EMKM dengan aspek persepsi terhadap laporan keuangan?
3. Bagaimana kesiapan pelaku UD – DANI MUSAFA dalam menerapkan SAK EMKM dengan aspek sumber daya manusia (SDM)?

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka batasan masalah penelitian ini hanya akan menganalisis kesiapan pelaku UD – DANI MUSAFA dalam

menerapkan SAK EMKM dengan aspek pemahaman standar akuntansi keuangan, persepsi terhadap laporan keuangan, dan sumber daya manusia.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan maka tujuan penelitian ini yaitu

1. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman pelaku UMKM dalam menerapkan SAK EMKM
2. Untuk mengetahui bagaimana persepsi pelaku UMKM dalam menerapkan SAK EMKM
3. Untuk mengetahui bagaimana sumber daya manusia pelaku UMKM dalam menerapkan SAK EMKM

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis dari hasil penelitian ini yaitu diharapkan mampu memberikan manfaat untuk menambah informasi terkait dengan bidang yang diteliti, dan dapat meningkatkan kinerja keuangan UD – DANI MUSAFI, serta sebagai bahan pertimbangan untuk membuat laporan keuangan yang sesuai dengan standar SAK EMKM sehingga dapat digunakan untuk menentukan strategi bisnis untuk mengembangkan usahanya.

1.5.2. Manfaat Manfaat Praktis

A. Bagi Penulis

Bagi penulis penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan, pengalaman, pemahaman, serta untuk memperluas ilmu dan wawasan di bidang akuntansi mengenai kesiapan pelaku UMKM dalam penerapan SAK EMKM pada laporan keuangan yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam memperoleh permodalan tambahan bagi UMKM.

B. Bagi UMKM

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan acuan dalam pentingnya kesiapan pelaku UMKM dalam penerapan SAK EMKM pada laporan keuangan usaha.

C. Bagi Pembaca

Bagi pembaca penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan referensi, serta dapat menambah ilmu dan pengetahuan mengenai kesiapan pelaku UMKM dalam penerapan SAK EMKM dalam membuat laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku.